1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Perkembangan Inflasi Sulsel

Pada triwulan III 2026, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi 0,70% (mtm), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm) pada triwulan II 2026. Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi Sulsel sampai dengan triwulan III 2026 tercatat sebesar 3,22% (ytd) dengan inflasi tahunan sebesar 3,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Nasional yang mencatatkan inflasi 3,28% (yoy). Inflasi triwulan III 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, tomat, dan pemeliharaan/service. Inflasi komoditas pangan seperti cabai rawit dan tomat terjadi seiring keterbatasan pasokan akibat kekeringan dan gangguan logistik pasca kelangkaan BBM di Sulsel, serta daging ayam ras dan telur ayam ras didorong oleh seiring normalisasi harga sesuai arahan Kementan agar SPPG dapat membeli sesuai HAP di tengah meningkatnya permintaan pasca aktifnya MBG. Sementara itu, pemeliharaan/service mengalami kenaikan harga seiring dengan peningkatan ekspektasi harga dipengaruhi oleh gangguan logistik akibat kelangkaan BBM pada minggu ke-II hingga minggu ke-III September di Sulsel. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi sejumlah komoditas seperti udang basah seiring ketersediaan pasokan didukung oleh fenomena upwelling dampak dari el nino. Secara tahunan, inflasi didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sebesar 27,17% (yoy) sejalan dengan kenaikan harga emas global sebesar 6,53% (yoy). Memperhatikan perkembangan tersebut, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,75% (yoy), berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).

Secara bulanan, inflasi di Sulsel terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,77% (andil 0,56% mtm), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang mencatatkan deflasi 0,01% (andil 0,00% mtm) yang didorong oleh peningkatan harga cabai rawit. Inflasi juga didorong oleh Kelompok Transportasi dengan andil sebesar 0,07% (mtm) dipengaruhi kenaikan harga pemeliharaan/service. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya dengan andil -0,00% (mtm) yang bersumber dari penurunan harga mainan anak.

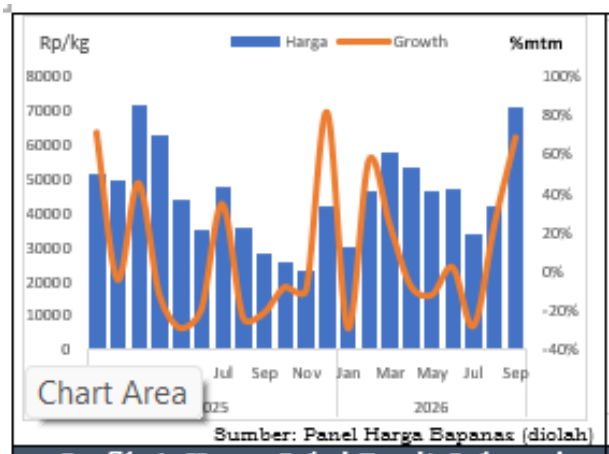
Tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2026 diprakirakan berada pada rentang -0,35% s.d. 0,05% (mtm). Adapun rata-rata inflasi bulan Oktober dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,09% (mtm). Tekanan inflasi diprakirakan lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh level harga komoditas aneka cabai yang telah berada dalam level tinggi dan berpotensi mengalami penurunan seiring panen yang terjadi dibeberapa wilayah sentra. Selanjutnya, komoditas beras juga berpotensi mengalami penurunan seiring disalurkannya 540 ton beras premium oleh Bulog per 28 September 2026. Lebih lanjut, kondisi gelombang laut pada Oktober 2026 relatif kondusif pada kategori rendah (0–1,00 meter) sehingga dapat mendukung aktivitas perikanan tangkap di tengah peristiwa upwelling yang didorong oleh fenomena El Nino. Meskipun demikian, normalisasi harga komoditas pangan daging ayam ras dan

telur ayam ras seiring arahan Kementan agar SPPG membeli dengan HAP dan kenaikan harga pakan ternak dampak kekeringan berpotensi terus berlanjut. Harga Gabah Kering Panen (GKP) yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), kenaikan harga pupuk non subsidi, peningkatan permintaan beras di luar Sulsel, dan pergeseran pola tanam juga berpotensi menekan harga beras yang lebih lanjut. Masuknya kondisi ENSO yang diprakirakan menjadi El Nino Sangat Kuat pada triwulan IV 2026 yang memberikan iklim kering juga berpotensi mengganggu produksi panen komoditas beras dan hortikultura. Di sisi lain, komoditas administered prices mengalami penurunan harga minyak global (brent oil) ke level 91,11 USD atau turun -0,21% (mtm) seiring diversifikasi alur ekspor minyak oleh Saudi Arabia meskipun masih terdapat Risiko konflik AS-Iran masih mengalami ketidakpastian ke depan. Hal ini tercermin dari harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang tidak mengalami kenaikan per Oktober 2026. Lebih lanjut, tarif batas atas fuel surcharge tiket pesawat domestik tidak mengalami kenaikan pada Oktober 2026 berpotensi menahan inflasi yang lebih tinggi. Namun demikian, ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis lainnya yang masih memadai sebagaimana tercermin pada neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus dapat menahan laju inflasi.

b. Perkembangan Harga Kebutuhan

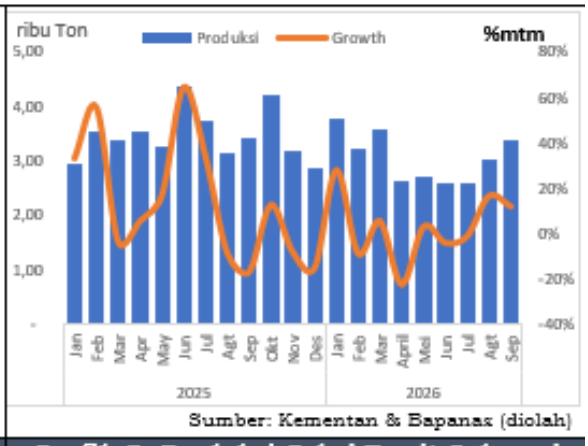
b.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada triwulan III 2026 memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,56% (andil mtm), lebih tinggi dibanding realisasi triwulan II 2026 yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,05 (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 1,77% (mtm), lebih tinggi dari sebelumnya yang tercatat inflasi 0,16% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas cabai rawit (0,21%; andil mtm), daging ayam ras (0,16%; andil mtm), telur ayam ras (0,05%; andil mtm), dan tomat (0,04%; andil mtm). Kenaikan harga komoditas pangan hortikultura (cabai rawit dan tomat) dipengaruhi faktor keterbatasan pasokan akibat kekeringan dan gangguan logistik pasca kelangkaan BBM di Sulsel, sementara daging ayam ras dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga seiring normalisasi harga sesuai arahan Kementan agar SPPG dapat membeli sesuai HAP di tengah meningkatnya permintaan pasca aktifnya MBG.

Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komoditas udang basah (-0,02%; andil mtm), asam (-0,01%; andil mtm), ikan nila (-0,00%; andil mtm), dan semangka (-0,00%; andil mtm). Penurunan harga udang basah didorong oleh ketersediaan pasokan didukung oleh fenomena upwelling dampak dari el nino.



Sumber: Panel Harga Bapanas (diolah)

Grafik 4. Harga Cabai Rawit Sulawesi Selatan



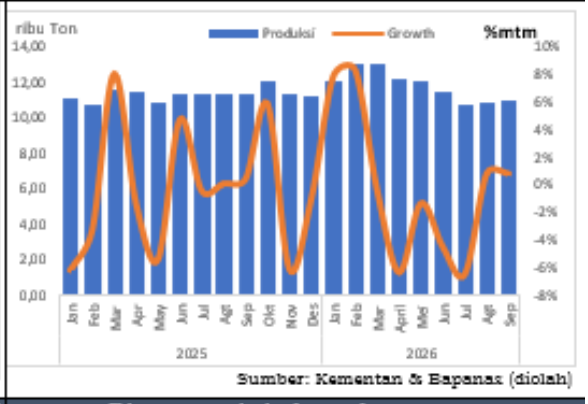
Sumber: Kementan & Bapanas (diolah)

Grafik 5. Produksi Cabai Rawit Sulawesi Selatan



Sumber: Panel Harga Bapanas (diolah)

Grafik 6. Harga Daging Ayam Ras Sulawesi Selatan



Sumber: Kementan & Bapanas (diolah)

Grafik 7. Produksi Daging Ayam Ras Sulawesi Selatan

Secara tahunan, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada September 2026 masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 5,16% (yoy) dengan andil mencapai 1,60% (andil yoy). Tekanan inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 2,55% (yoy) dengan andil mencapai 0,80% (andil yoy). Berdasarkan komoditas, inflasi tahunan terutama disumbangkan oleh cabai rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng. Adapun beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi, antara lain tomat, bawang merah, dan jeruk nipis/limau.

b.2. Kelompok Transportasi pada triwulan III 2026 mencatatkan inflasi dengan andil 0,07% (andil mtm), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi dengan andil sebesar 0,14% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini tercatat inflasi sebesar 0,56% (mtm), lebih rendahdari triwulan sebelumnya yang tercatat 1,41% (mtm). Tekanan Inflasi pada kelompok ini terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas pemeliharaan/service yang mencatat inflasi sebesar 4,84% (mtm) dengan andil sebesar 0,03% (andil mtm). Kenaikan harga pemeliharaan/service diperkirakan dipengaruhi oleh peningkatan biaya operasional dan distribusi suku cadang di tengah gangguan logistik akibat kendala pasokan BBM pada minggu ke-II hingga minggu ke-III September di Sulsel.

Secara tahunan, Kelompok Transportasi pada September 2026 mencatatkan inflasi sebesar 3,74% (yoy) dengan andil 0,47% (andil yoy), lebih tinggi dari realisasi Agustus 2026 yang sebesar 2,86% (yoy) dengan andil 0,36% (andil yoy). Bensin menjadi

komoditas penyumbang inflasi utama dengan andil sebesar 0,15% (andil yoy) akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi.

b.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada triwulan III 2026 memberikan andil inflasi bulanan sebesar 0,02% (andil mtm), relatif sama dari realisasi triwulan II 2026 yang mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,02% (andil mtm). Secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm). Inflasi pada kelompok ini terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas bahan bakar rumah tangga yang mencatat inflasi sebesar 1,01% (mtm) dengan andil sebesar 0,02% (andil mtm). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga seiring kelangkaan LPG 3 kg akibat meningkatnya penggunaan LPG untuk pompa air saat kekeringan (lebih murah dibandingkan menggunakan solar) dan kebutuhan Maulid Nabi.

Secara tahunan, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga pada September 2026 mencatatkan inflasi sebesar 1,52% (yoy) dengan andil 0,22% (andil yoy), relatif sama dari realisasi Agustus 2026 yang sebesar 1,53% (yoy) dengan andil 0,22% (andil yoy). Sewa rumah menjadi komoditas penyumbang inflasi utama dengan andil sebesar 0,09% (andil yoy) akibat peningkatan permintaan dan penyesuaian harga sewa rumah tahunan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2026 diprakirakan berada pada rentang -0,35% s.d. 0,05% (mtm). Adapun rata-rata inflasi bulan Oktober dalam 3 (tiga) tahun terakhir 0,09% (mtm). Tekanan inflasi diprakirakan lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh level harga komoditas aneka cabai yang telah berada dalam level tinggi dan berpotensi mengalami penurunan seiring panen yang terjadi dibeberapa wilayah sentra. Selanjutnya, komoditas beras juga berpotensi mengalami penurunan seiring disalurkannya 540 ton beras premium oleh Bulog per 28 September 2026. Lebih lanjut, kondisi gelombang laut pada Oktober 2026 relatif kondusif pada kategori rendah (0–1,00 meter) sehingga dapat mendukung aktivitas perikanan tangkap di tengah peristiwa upwelling yang didorong oleh fenomena El Nino. Meskipun demikian, normalisasi harga komoditas pangan daging ayam ras dan telur ayam ras seiring arahan Kementan agar SPPG membeli dengan HAP dan kenaikan harga pakan ternak dampak kekeringan berpotensi terus berlanjut. Harga Gabah Kering Panen (GKP) yang berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), kenaikan harga pupuk non subsidi, peningkatan permintaan beras di luar Sulsel, dan pergeseran pola tanam juga berpotensi menekan harga beras yang lebih lanjut. Masuknya kondisi ENSO yang diprakirakan menjadi El Nino Sangat Kuat pada triwulan IV 2026 yang memberikan iklim kering juga berpotensi mengganggu produksi panen komoditas beras dan hortikultura. Di sisi lain, komoditas administered prices mengalami penurunan harga minyak global (brent oil) ke level 91,11 USD atau turun -0,21% (mtm) seiring diversifikasi alur ekspor minyak oleh Saudi Arabia meskipun

masih terdapat Risiko konflik AS-Iran masih mengalami ketidakpastian ke depan. Hal ini tercermin dari harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang tidak mengalami kenaikan per Oktober 2026. Lebih lanjut, tarif batas atas fuel surcharge tiket pesawat domestik tidak mengalami kenaikan pada Oktober 2026 berpotensi menahan inflasi yang lebih tinggi. Namun demikian, ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis lainnya yang masih memadai sebagaimana tercermin pada neraca pangan Sulawesi Selatan yang sebagian besar berada pada kondisi surplus dapat menahan laju inflasi.

Komoditas	Neraca (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Ketahanan Stok (Hari)
Beras	1.308.463,53	1.392.570,08	84.106,55	466
Jagung	635.235,15	728.568,85	93.333,70	207
Kedelai	-22.292,91	-17.961,85	4.331,06	0
Bawang Merah	24.682,48	28.730,32	4.047,84	154
Bawang Putih	992,97	2.452,55	1.459,58	19
Cabai Besar	1.031,68	2.152,90	1.121,22	27
Cabai Rawit	1.326,59	3.609,48	2.282,89	8
Daging Sapi / Kerbau	8.895,96	10.821,79	1.925,83	138
Daging Ayam Ras	49.615,23	57.886,00	8.270,77	179
Telur Ayam Ras	23.083,38	44.898,00	21.814,62	31
Gula Pasir	20.221,64	27.455,64	7.234,00	83
Minyak Goreng	39.947,13	46.530,73	6.583,60	181

Sumber: Bapanas, diolah

Tabel 2. Neraca Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Oktober 2026

No.	Jenis BBM	Harga (Rp/liter)		Perubahan (m to m)
		Sep-26	Oct-26	
1	Pertamax	16.300	16.300	0,00%
2	Pertamax Turbo	20.000	20.000	0,00%
3	Dexlite	24.200	24.200	0,00%
4	Pertamina Dex	25.150	25.150	0,00%
5	Pertamina Dex Racing	16.300	16.300	0,00%

Sumber: Pertamina, diolah

Tabel 3. Harga BBM Nonsubsidi Provinsi Sulawesi Selatan Oktober 2026

Pada Oktober 2026, curah hujan di Sulawesi Selatan diprakirakan berada pada kategori rendah (0-100 mm). Kategori rendah diprakirakan terjadi di hampir seluruh wilayah Sulsel sehingga berpotensi mengganggu produktivitas komoditas pangan secara umum. Lebih lanjut, inflasi pada kelompok penyedia makanan dan minuman juga tetap perlu dicermati, seiring masih berlanjutnya kenaikan harga beras sebagai komoditas pangan strategis.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan sejumlah upaya pengendalian harga pangan selama Triwulan III 2026, sebagai berikut:

K1. KETERJANGKAUAN HARGA

1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada HBKN.
2. Sidak pasar, gudang distributor, dan gudang BULOG dalam rangka pemantauan harga.
3. Koordinasi aktif antara TPID dengan *stakeholders* dalam *review* kebijakan *Administered Prices* di daerah.

Mendorong pemanfaatan dana APBD untuk program pengendalian inflasi dan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

K2. KETERSEDIAAN PASOKAN

1. Peningkatan produksi pangan melalui Program Luas Tambah Tanam, mandiri benih, perbaikan irigasi, termasuk implementasi varietas benih unggul.
2. Dukungan/fasilitasi alat dan mesin penunjang produksi melalui penyaluran PI-KEKDA, termasuk penerapan *digital farming* hulu pada komoditas padi maupun hortikultura (bawang merah dan cabai) untuk efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.
3. Gerakan Menanam Pangan Strategis di lingkungan kerja/pekarangan kosong (*urban farming*), misalnya Gerakan Tanam Cabai oleh ASN.
4. *Launching* Gerakan Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Barru pada lahan tadah hujan seluas 180 hektar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

K3. KELANCARAN DISTRIBUSI

1. Implementasi program SIPEPPA, yakni program kerja sama antara Pemerintah dan toko ritel untuk distribusi bahan pangan. Untuk tahun ini, akan didorong perluasan pada beberapa ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.
2. Penandatanganan MoU KAD, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Optimalisasi program *Mini Distribution Center (MDC)* untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis masyarakat dengan harga terjangkau sesuai HET pada beberapa pasar di kota IHK dan akan diperluas pada kota-kota non-IHK lainnya.
4. Program peningkatan pemasaran digital (*digital farming* sisi hilir) melalui program *onboarding* UMKM pangan pada platform *e-commerce/social commerce*.

K4. KOMUNIKASI EFEKTIF

1. HLM untuk stabilisasi harga pangan secara reguler di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya untuk sinergi bersama program pengendalian inflasi pada momen HBKN.
2. Kegiatan edukasi perkembangan inflasi kepada masyarakat melalui media (siaran pers, media sosial, *media gathering*, *talk show*, dan lainnya).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2026 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, namun tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Dari sisi permintaan, perbaikan daya beli masyarakat diprakirakan mendorong peningkatan konsumsi, sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi

(UMP) sebesar 7,2%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP tahun 2025 yang sebesar 6,5%. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mencapai 100% penerima dari total target pada tahun 2026 juga turut meningkatkan permintaan pangan strategis, meskipun terdapat kebijakan pengurangan penyaluran dari 6 hari menjadi 5 hari per minggu. Dari sisi administered prices, tekanan inflasi bersumber dari penyesuaian harga BBM dan LPG nonsubsidi seiring gangguan pasokan minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Dari sisi pasokan, produktivitas beberapa komoditas pangan strategis berpotensi terganggu sejalan dengan kondisi ENSO yang diprakirakan akan memasuki El Nino sangat kuat pada semester II 2026 yang memberikan iklim kering. Meskipun demikian, El Nino diprakirakan dapat mendukung produksi komoditas perikanan dengan adanya fenomena upwelling. Selain itu, kondisi ENSO yang berada pada fase La Nina lemah yang bertahan hingga pertengahan tahun 2026 dapat mendukung produktivitas komoditas pangan. Sejumlah kebijakan Pemerintah yang turut mendukung pengendalian inflasi terus berlanjut. Pada 2026, Pemerintah kembali berencana melanjutkan program bantuan pangan beras sebesar 720 ribu ton kepada sekitar 18 juta PBP secara nasional yang akan disalurkan selama empat bulan pertama, sehingga turut menopang daya beli masyarakat dan menahan tekanan permintaan di pasar. Keberlanjutan program SPHP beras dengan peningkatan batas maksimal pembelian menjadi 25 kg per konsumen, serta penyaluran Minyakita juga diprakirakan mampu menjaga kecukupan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas tersebut. Selain itu, peningkatan target penyaluran SPHP jagung sebesar 372% (yoy) dari realisasi tahun 2025 diprakirakan dapat menjaga stabilitas harga jagung pakan, menekan biaya produksi peternak unggas, dan mendukung stabilitas harga telur serta daging ayam ras. Efisiensi program MBG dengan penurunan hari penyaluran, rencana pengurangan target penerima, dan efisiensi anggaran berpotensi menahan inflasi pangan yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya akibat MBG. Namun demikian, sejumlah faktor risiko inflasi pangan masih perlu dicermati, seiring prakiraan potensi dampak El Nino sangat kuat, berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan, khususnya di Sidrap dan Luwu Utara sebagai sentra padi, serta Enrekang sebagai sentra bawang merah, sehingga dapat memicu fluktuasi harga komoditas segar. Harga pupuk global meningkat sebesar 30,58% (yoy) pada semester I 2026 berpotensi meningkatkan harga input komoditas, meskipun demikian dampaknya terhadap harga domestik diprakirakan relatif terbatas mengingat kapasitas produksi pupuk nasional masih mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan dalam negeri. Ketidakpastian eksternal juga masih perlu diwaspadai, terutama terkait potensi eskalasi perang antara AS-Iran-Israel, berlanjutnya tensi perdagangan global, serta risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pergerakan harga komoditas internasional, meningkatkan risiko imported inflation, dan memberikan tekanan terhadap prospek inflasi ke depan.

Inflasi pada tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan stabilitas harga. Pemerintah berkomitmen mendukung pencapaian swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), peningkatan infrastruktur pertanian, serta modernisasi sektor agribisnis.

Penguatan produksi dan serapan beras terus didorong, sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi beras nasional pada tahun 2026 serta rencana peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, yang diharapkan mendukung stabilitas harga beras. Dalam konteks Sulawesi Selatan, dukungan penguatan hulu pertanian tercermin dari alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 sebesar 846.721 ton, meningkat 27,65% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi didukung oleh program Mandiri Benih yang kembali berjalan pada 2026 dengan total penyaluran benih padi unggul sebanyak 2,31 juta kg, meningkat 84,8% dari alokasi tahun 2025 sebanyak 1,25 juta kg. Bantuan benih tersebut akan diberikan secara gratis kepada petani di seluruh kab/kota se-Sulsel dengan total luasan lahan penerima sebesar 92.334 Ha, meningkat 84,69% dari alokasi tahun 2025 sebesar 50.000 Ha. Selain itu, penetapan kebijakan dan insentif pemerintah melalui penguatan regulasi dan insentif fiskal, antara lain pengetatan implementasi DMO MinyaKita minimal 35% melalui Permendag No. 43 Tahun 2025, peningkatan batas maksimal penyaluran beras SPHP menjadi 25 kg (5 pax) per konsumen, serta perluasan SPHP jagung guna memperkuat pasokan dan stabilitas harga pangan, serta pemberian insentif PPN DTP 100% untuk pembelian properti berdasarkan PMK No. 90 Tahun 2025. Sementara itu, pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas SABER) melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 4/2026 memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan harga dan mutu komoditas strategis, sehingga diharapkan harga pangan lebih terkendali dan tekanan inflasi dapat diredam. Selanjutnya, upaya pengendalian harga oleh TPID se-Sulawesi Selatan tetap dilaksanakan dalam kerangka strategi 4K sepanjang tahun 2026, melalui implementasi berbagai program unggulan GPIPS, seperti operasi pasar, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), urban farming, pengembangan klaster pangan, High Level Meeting (HLM), serta penguatan kelancaran distribusi. Sinergi kebijakan tersebut diprakirakan mampu menjaga inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pasokan pangan diperkirakan terjaga seiring upaya pengendalian harga oleh TPID dalam kerangka strategi 4K disertai dengan program unggulan GNPIP, yakni operasi pasar, Kerjasama Antar Daerah, *urban farming*, pengembangan klaster, *High Level Meeting,* dan kelancaran distribusi. Kegiatan Gelar Pangan Murah dan *Mini Distribution Center* (MDC) juga akan berlanjut sampai dengan akhir tahun dengan melibatkan distributor komoditas pangan.

Strategi khusus sebagai upaya menjaga stabilisasi harga di Sulsel ke depan, antara lain:

1. Melaksanakan GPM dengan prinsip “4T” - tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat komoditas secara masif dengan fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi pada HBKN RAFI dan berada di atas HET, seperti beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir.
2. Mengoptimalkan KAD untuk komoditas utama penyumbang inflasi dengan memanfaatkan data neraca pangan & prakiraan BMKG, menyiapkan *buffer stock*

sebagai antisipasi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, serta menerbitkan Perda terkait Cadangan Pangan untuk menjaga ketahanan pasokan.

3. Memastikan kelancaran distribusi dan penyerapan beras SPHP dan Minyakita melalui koordinasi Bulog dan Pemda/Pemkot, khususnya pada daerah defisit dan berada di atas HET.
4. Mendorong penggunaan BTT untuk bantuan ongkos angkut komoditas inflasi, mendorong *moral suasion* & komunikasi publik Belanja Bijak, dan mengoptimalkan program *urban farming* untuk menanam barito (bawang, rica/cabai, tomat) di lahan/pekarangan kosong.
5. Melanjutkan Program Mandiri Benih dan penyediaan bibit unggul, serta optimalisasi lahan kosong melalui program *urban farming* untuk komoditas bawang merah, rica/cabai, tomat (barito) di pekarangan, lahan sekolah, dan pesantren guna memperkuat ketahanan pangan lokal.
6. Memanfaatkan teknologi pascapanen, seperti sinar gamma dan ozonisasi guna memperlambat pembusukan produk hortikultura.
7. Menyediakan *cold storage* di lokasi pendaratan ikan (PPI) serta pembangunan pabrik es mini di pelabuhan strategis untuk menjaga kualitas dan memperpanjang umur simpan ikan hasil tangkapan.
8. Mendorong kerja sama antara petani dan *offtaker* melalui pola kontrak yang disupervisi pemerintah daerah, guna memastikan penyerapan hasil produksi dan stabilitas harga.
9. Melakukan pengkinian Website Neraca Pangan oleh Pemerintah Kota/Kab dengan data yang andal (*reliable*) dan terkini (*timely*), khususnya dalam pencatatan arus keluar komoditas pangan, guna mendukung perumusan kebijakan yang efektif dan dasar faktual untuk melakukan kerja sama ketahanan pangan antar daerah.
10. Menambah pasokan dan memastikan kelancaran distribusi MinyakKita karena hampir seluruh kab/kota di Sulsel berada di atas HET.